

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Konsepsi Zakat

### 1. Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.<sup>24</sup>

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

<sup>24</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.<sup>25</sup>
3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>26</sup>

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bndung/UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut.

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih

<sup>25</sup> Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, h. 6-7

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2012), cet. Ke-1, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimanya (*mustahik*).

2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dan akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi *mustahik*-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76

## 2. Dalil-dalil Syarat tentang Zakat

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya.<sup>28</sup>

Dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah AWT.

### a. Al-qur'an

1. Firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*<sup>29</sup>

2. Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka."*<sup>30</sup>

3. Firman Allah dalam surah al-Bayyinah ayat 5:

<sup>28</sup> Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an & Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h.114

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI. *Op.cit*, h.7

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI. *Op.cit*, h.203



وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٣١﴾

Artinya:

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus."*<sup>31</sup>

### 3. Hukum Menunaikan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan Islam terbangun di atas lima rukun tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

*"Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram."*

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir.

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI. *Op.cit*, h.598

Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.<sup>32</sup>

#### 4. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

##### a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

1. Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqis*).
2. Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
3. Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan

<sup>32</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), cet. ke-1, h. 5-6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.<sup>33</sup>

#### b. Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

1. Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
2. Milik penuh, artiya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
3. Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
4. Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab

<sup>33</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), edisi 1, cet. ke-3, h. 250

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

5. Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.
6. Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
7. Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.<sup>34</sup>

### 5. Fungsi dan Hikmah Zakat

#### a. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama

<sup>34</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288-290



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyyah*).

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
2. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
3. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti;menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi,serta membangunkan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.<sup>35</sup>

#### b. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam

<sup>35</sup> Zulkifli, *Op.cit*, h.5-6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. sebagaimana firmanNya dalam surah an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya:

*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki (QS. an-Nahl: 71).*<sup>36</sup>

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya.

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI. *Op.cit*, h.274

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 85-86.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.<sup>38</sup>
- e. Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
- f. Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.<sup>39</sup>
- g. Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.
- h. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (bakhil).
- i. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), Cet. ke-1, h. 17

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 103

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, h.19-22

## B. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

### 1. Pengertian Pengelolaan Zakat dan Tujuannya

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>41</sup>

Pengelolaan zakat bertujuan:<sup>42</sup>

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ketingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim.

### 2. Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan:<sup>43</sup>

1. Syariat Islam.
2. Amanah, maksudnya adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>42</sup> Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>43</sup> Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keadilan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum, maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
6. Terintegrasi, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, maksudnya adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### **3. Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat terdiri dari: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Fungsi BAZNAS yaitu dimuali dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada presiden, melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.

Ketentuan anggota BAZNAS yaitu:<sup>44</sup>

- a. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga propesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.

---

<sup>44</sup> Pasal 8 hingga Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
  - c. Anggota Basznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari anggota masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - d. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.
  - e. Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu:
    - Warga negara Indonesia;
    - Beragama Islam;
    - Bertakwa kepada Allah SWT;
    - Berakhlak mulia;
    - Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
    - Sehat jasmani dan rohani;
    - Tidak menjadi anggota partai politik;
    - Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
    - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  - f. Anggota BAZNAS dihentikan apabila:
    - Meninggal dunia;
    - Habis masa jabatan;
    - Mengundurkan diri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus;
  - Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- g. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketentuan LAZ yaitu:

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>45</sup>
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
  - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
  - d. Memiliki pengawas syariat.
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
  - f. Bersifat nirlaba.
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

<sup>45</sup> Pasal 17 hingga 19 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### 4. Pelaporan

BAZNAS wajib membuat laporan zakat sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah setempat.
- b. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- d. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala.
- e. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Pembayaran zakat pada dasarnya harus melalui lembaga zakat negara yang didirikan oleh Ulil Amri yaitu Badan Amil Zakat. Dalam

<sup>46</sup> Pasal 29 ayat (1-6) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitan ini BAZNAS, menerapkan sistem pooling & Disbursement. Artinya, zakat yang telah disetorkan dapat diberikan kembali kepada UPZ ataupun mustahiq yang telah diberikan alamatnya kepada Badan Amil Zakat oleh Muzakki sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

UPZ yang telah menerima kembali dana zakat sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan BAZNAS harus menyalurkan kepada mustahiq yang berhak dan telah disepakati sebelumnya, dan tidak boleh menahan uang zakat tersebut. UPZ juga akan menerima bagian dana amilnya dari Badan Amil Zakat.<sup>47</sup>

Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, dan diniati untuk beribadah kepada Allah. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan, badan Amil Zakat harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan tempat penyalurannya ke mana, sehingga ketika ada yang bertanya tentang penggunaannya dapat diberi jawaban.

BAZ juga hendaknya selalu kontak dengan para pemberi zakat, dan tidak segan-segan memberi ucapan terima kasih dan tanda terima kepada para pembayar zakat, sehingga para pembayar tidak beranggapan

<sup>47</sup> Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Yayasan Bermula dari Kanan, 2004), cet. ke-2, h. 15-16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa uang zakat yang dibayarkan menguap entah kemana. Manajemen seperti ini perlu dilakukan demi menghindarkan para pembayar zakat berprasangka yang tidak baik. Tentu semua ini diperlukan biaya administrasi yang memadai, sehingga keberadaan BAZ sebagai pelaksana zakat atau ‘amil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>48</sup>

Pendistribusian zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari’ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dari fungsi zakat,

<sup>48</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet-1, h.164-165

teutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.<sup>49</sup>

### C. Pengumpulan Zakat

Untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amal zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif:

Aktivitas pengumpulan terdiri dari:

1. Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya.
2. Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amal zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amal zakat tersebut.

Strategi pengumpulan terbagi tiga, yaitu:

1. *Bellow The Line*; yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS di lokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial. Misalnya: membuka stand pameran, dan lain-lain.
2. *Above The Line*; yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik

<sup>49</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) Cet. Ke-1, h. 119

minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut. Misalnya: iklan di koran/majalah dan radio/TV.

3. *Aliansi*, yaitu aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

Langkah-langkah pengumpulan:

1. Riset; yaitu melakukan riset dan analisa terdapat potensi dan perilaku calon muzaki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain yang dapat memengaruhinya.
2. Perencanaan; yaitu membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
3. Organizing; yaitu menetapkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah dan kualifikasinya.
4. Pelaksanaan; yaitu menjelaskan layanan sesuai dengan telah direncanakan.
5. Monitoring dan pengawasan; melakukan monitoring dan pengawasan apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

Jenis layanan:

1. Outlet Amil Zakat; setor tunai, cek/giro bilyet, debt card, dan lain-lain.
2. Via kantor muzakki; potong gaji.
3. Via Bank; setor tunai, pindah buku, transfet, dan lain-lain.
4. Layanan jemput dana; layanan jemput kelokasi (kantor/rumah) muzakki.



Laporan:

1. Laporan bagi lembaga yang mengelola dana publik adalah sesuatu yang wajib.
2. Laporan tersebut harus dipublikasikan ke media massa atau dikirim kepada muzakki dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>50</sup>

#### D. Distribusi zakat

Kata distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.<sup>51</sup>

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan, seperti firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

<sup>50</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 334

<sup>51</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), Edisi.1, Cet.1, h. 100-102

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>52</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang 8 sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan. Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan golongan yang dimaksud tersebut dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiknya:

1. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.
2. Miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Amil, adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: muslim, mukallaf (dewasa, sehat pikirannya/cakap hukum, adil, orang yang jujur, orang yang memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI. *Op.cit*, h.196

4. Golongan Muallaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan Muallaf ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim dan non-Muslim, yaitu:

5. Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.

- a. Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya.
- b. Golongan yang baru masuk Islam.
- c. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- d. Pemimpin atau tokoh Muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah.
- e. Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh.
- f. Kaum muslimi mengurus zakat para *Mani'* zakat (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan).

6. Riqab, hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Rozalinda, *Op.cit*, h. 262-265

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Gharimin, adalah orang yang terlilit utang yang tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut muncul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarga.
8. Fisabilillah, seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, peralatan perang atau kebutuhan perang lainnya.
9. Ibnu Sabil, adalah orang yang bepergian bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan mengalami kehabisan bekal dalam perjalanannya. Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan.<sup>54</sup>

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak berhak menerima pembagian zakat, yaitu:

1. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
2. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah (ahlul bait).
4. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.<sup>55</sup>
5. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan *ijma'* ulama; dan kafir *dzimmi* menurut jumhur fukaha.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-1, h. 110

<sup>55</sup> Hertina, *Problematisa Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h. 11-12

<sup>56</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 271



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar distribusi memberikan segnifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

#### 1. Prinsip keadilan dan pemerataan.

Prinsip keadilan dan pemerataan mengandung maksud, *pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkantumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

#### 2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang.

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama manusia. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.

#### 3. Prinsip solidaritas sosial.

Islam menghimbau adanya solidaritas sosial yang menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 150

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
2. Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
3. Untuk mensucikan jiwa dan harta.
4. Untuk membangun generasi yang unggul.
5. Untuk mengembangkan harta.<sup>58</sup>

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyaluran.

<sup>58</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Ed. 1, Cet. 1, h. 106

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.<sup>59</sup>

Pendistribusian zakat akan lebih efektif, apalagi ditambah dengan infak dan shodaqah. Berikut gambar 3.1 berkenaan dengan model pendistribusian zakat, infak dan shodaqah.

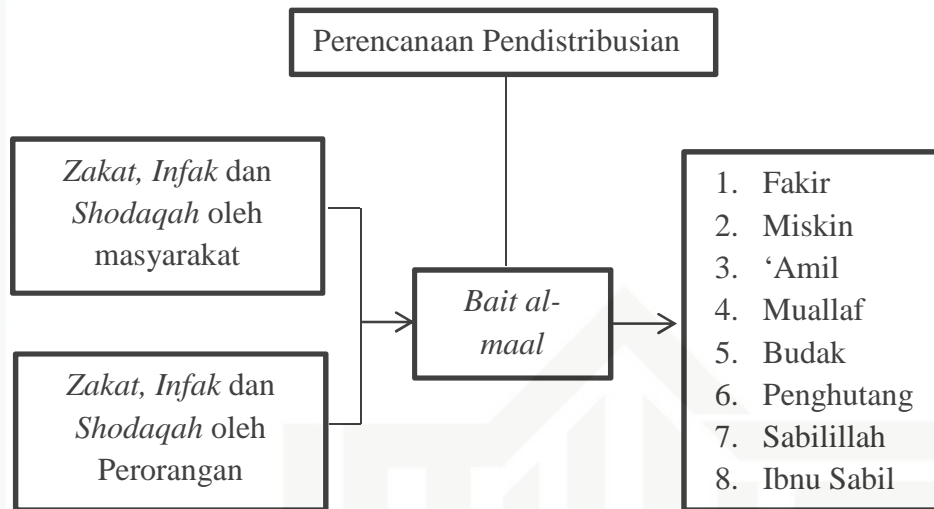
Bila dana zakat, infak dan shodaqah mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya dari:

- a. Dana sosial-kemasyarakatan untuk kebutuhan pokok minimal masyarakat fakir.
- b. Dana pembangunan-ekonomi untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
- c. Dana prestasi kerja berupa gaji bagi ‘amil.
- d. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah untuk muallaf.
- e. Dana pembebasan hutang masyarakat fakir-miskin atau pun lainnya.
- f. Dana perjuangan membebaskan perbudakan.
- g. Dana perjuangan menegakkan jalan Allah SWT., jalan kebenaran pendidikan pembangunan ilmu dan kemaslahatan umum lainnya.
- h. Dana mengatasi permasalahan masyarakat lainnya (ibnu sabil).<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Mardani, *Op.cit*, h. 270

<sup>60</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Edisi Pertama, Cet. ke-1, h.93-95

**Gambar III.1: Model Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah**



### E. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Adapun produktif dalam “zakat produktif” ini lebih konotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusinya bersifat produktif.<sup>61</sup>

Sebagaimana diketahui sasaran (Masharif) yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fisabilillah yang sangat luas cukupnya sebagaimana telah dikemukakan. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaanya sudah dipikirkan matang-matang dan

<sup>61</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar: 2008), Cet. 1, h.63



sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntutan (lembaga) pengelola zakat, seperti basis umpannya. Pola apapun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (kemelaratan).

Adapun hukum zakat produktif ini tidak disebutkan secara tegas didalam al-Qur'an, al-Hadist dan ijma apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surat at-Taubah oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan, tidak disebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>62</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>63</sup>

Distribusi zakat produktif adalah pembagian atau penyaluran zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa mendatang.

<sup>62</sup> Asnaini, *Ibid*, h.77

<sup>63</sup> Wabah Al-Zuhayly, *Op.cit*, h. 88

Keharusan memproduktifkan ZIS telah dicantumkan secara konstitusional dalam UU zakat No.38/1999. Dalam pasal 16 UU tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Alokasi dana BAZ untuk usaha produktif adalah ZIS yang berasal dari infaq, sedekah, hibah, wasiat dan waris. Dalam mengemban tugas ini BAZ harus bekerjasama dengan BMT yang canggih atau bank syariah yang berpengalaman.<sup>64</sup>

Istilah zakat produktif kurang dikenal di masyarakat. Kemunculannya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk “kritik” terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diterima oleh mustahik yang tersebut terakhir itu biasanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya “menghabiskan”, seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Hal ini sangatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua renta. Namun disisi lain terdapat mustahik yang keberadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria mustahik yang tersebut terakhir ini zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah.
2. Konsumtif kreatif, contohnya beasiswa.

---

<sup>64</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. ke -1, h.134

3. Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan.
4. Produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha.

Poin 2 sampai dengan poin 4, keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian diarahkan secara seksama bahwa para *fuqara* dan *masakin* tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbasan fisik namun diantara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tetapi mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini adalah kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan.<sup>65</sup>

## F. Islam dan problematika kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi.<sup>66</sup> Imam Manawy dalam kitabnya *Faidhu Qadir* menyebutkan, bahwa ada keterkaitan kuat antara kekafiran dan kefakiran, karena kefakiran

<sup>65</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. Ke-1, h.215-215

<sup>66</sup> Yusuf Qaradhaawi, *Op.cit*, h. 24

merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya.<sup>67</sup>

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab atruktural. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (*al-Qur'an* 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (*al-Qur'an* 42:30). *Kedua*, kemiskinan timbul timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (*al-Qur'an* 3:180, *al-Qur'an* 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil (*al-Qur'an* 9:34), memakan harta anak yatim (*al-Qur'an* 4:2,6,10), dan memakan harta riba.

*Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (*al-Qur'an* 28:1-88). *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba' (*al-Qur'an* 34:14-15) atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negrinya (*al-Qur'an* 59:8-9).<sup>68</sup>

Seorang antropolog Amerika, yang terkenal dengan konsep budaya kemiskinnnya, Oscar Lewis, memaknai kemiskinan sebagai ketidaksanggupan

<sup>67</sup> Yusuf Qaradhaawi, *Ibid.* h.26

<sup>68</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1. Edisi. Ke-1, h.23



seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya. Dalam konteks pengertian Lewis itu, kemiskinan adalah ketidakcukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki atau dikuasainya betul-betul sangat terbatas, sekedar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya, tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain sumber daya material yang ada pada dirinya hanya dapat dipakai untuk keperluan langsung konsumsi sehari-hari. Katakanlah pendapatan yang diperolehnya hanya cukup untuk hari ini, sementara untuk kebutuhan hari esok, ia harus mencarinya lagi.<sup>69</sup>

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada didalamnya dengan sebaik mungkin. Dengan tujuan inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi; seperti halnya kebutuhan makanan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis (menikah).

---

<sup>69</sup> Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. ke-1, h. 229

Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Dimana satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi. Mereka pun berhak mendapatkan bantuan yang terhormat dari pemerintah, tanpa disertai dengan celaan dan juga rasa sinis. Bantuan inilah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan. Karena, mereka mendapatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan juga dari bagian yang telah ditetapkan.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan upaya pendayagunaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan maka perlu mempertimbangkan kondisi fakir dan miskin. Dalam hal ini fakir dan miskin dapat dikelompokkan kedalam dua bagian:

1. Golongan yang lemah fisik dan harta bendanya.
2. Golongan yang lemah harta bendanya tetapi fisiknya mampu bekerja.

<sup>70</sup> Yusuf Qaradhaawi, *Op.cit.* h.27-29

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mereka yang lemah fisiknya, seperti jompo atau cacat fisik, mereka mendapat bagian secara konsumtif, yaitu diterjemahkan langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya. Tetapi akan lebih baik jika bagian mereka didayagunakan oleh suatu badan hukum yang bergerak dibidang usaha produktif, di bawah pengawasan amil zakat.

Untuk mereka-mereka yang lemah harta benda tetapi fisiknya mampu bekerja, mereka mendapat bagian secara produktif. Dapat juga didirikan semacam perkongsian atau koperasi, amil zakat sebagai pemilik modal dan para pekerjanya dan anggotanya terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat. Bagian untuk golongan kedua ini bisa berupa modal uang, alat-alat kerja atau barang dagangan. Bagi petani diberi modal traktor, nelayan diberi modal alat-alat penangkap ikan, pedagang diberi modal uang atau barang dagangan, peternak diberi modal hewan ternak, dan sebagainya.

Menurut Dr. Mustafa Edwin Nasution, bahwa zakat sebagai sarana instrument pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada, yaitu:

1. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syari'at (at-Taubah 60) untuk 8 golongan saja, selain dari itu tidak halal menerima zakat. Karena itu akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syari'at. Misalnya zakat perdagangan tarifnya hanya 2,5%.
3. Zakat memiliki taraf berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misalnya zakat pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5%, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan 10%.
4. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.
5. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.<sup>71</sup>

Dalam hubungannya pendayagunaan zakat secara produktif ini, an-Nawawy dalam *al-Majmu'* mengemukakan bahwa fakir dan miskin yang tenaganya mampu untuk bekerja, mereka diberi alat-alat sesuai dengan keahliannya atau diberi modal dagang agar mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya. Selanjutnya an-Nawawy menjelaskan lebih rinci, tukang roti, tukang minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, tukang jagal dan petukang lainnya, mereka diberi alat yang cocok dengan keahliannya. Demikian pula mereka yang

<sup>71</sup> Muh Said, *Op.cit* h. 112-113



mampu menggarap lahan pertanian diberi lahan agar digarap untuk memenuhi kebutuhan selama hidupnya.<sup>72</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), Cet. Ke-1, h. 227